

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar ND, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY.
- Askuri, 2007, *Panduan Pendidikan Pemilih, Mengantarkan Pemilih Cerdas*, Yogyakarta, KPU Provinsi DIY.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Budiarjo, Miriam, 2005, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Duverger, Maurice, 1972, "Factors in a Two-Party and Multiparty System," dalam *Party Politics and Pressure Groups* (New York: Thomas Y. Crowell).
- Gani, Soelistyati Ismail, 1994, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Harjono, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Karim, M. Rusli, 1997, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Kepartaian*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Nurwijayanti, Septi dan Nanik Prasetyoningsih, 2007, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Putra, Fadillah, 2003, *Partai Politik dan Kebijakan Publik, Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*
- Ramadhan, Muchammad Isnaeni, 2009, *Kompendium Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Saragih, Bintan R., 2003, *Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (Center for Local Government Innovation) Jakarta
- Suharizal, 2011,

Pemilukada ; Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sumartini, 2004, *Money Politics dalam Pemilu*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Suryatmaja M, I.B.G.,2003, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (*Center for Local Government Innovation*) Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 1994, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Jurnal

Ekatjahjana, Widodo, 2010, Beberapa Masalah dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilu/ Pilkada di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol 3, No. 1.

Fatkurohman, 2009, Memahami Pembubaran Partai Politik (Parpol) Era Orde Lama di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol 16, No. 2.

Hasyim, Syrifuddin, 2011, Analisis Pelaksanaan Demokrasi, dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Media Hukum*, Vol 18, No. 1.

Johan ,Djohermansyah, *Pilkada, Jangan ditunda!*, artikel Media Indonesia, 10 Januari 2005

M. Ma'ruf, *Optimisme Hadapi Pilkada Langsung*, artikel Kompas, 22 Februari 2005

Satriawan, Iwan, 2010, Faktor-faktor Kemenangan Calon Incumbent dalam Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Vol 3. No. 1.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 2 Mei 2005 Nomor : SE/08/A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 258/Kpts/KPU-WSB-012.329430/Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010.